

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan daerah di sektor pajak.

Salah satu kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi Pajak Kabupaten atau Kota. Pelimpahan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diresmikan oleh Kementerian Keuangan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 dan diberi masa transisi dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

Kabupaten Pati adalah salah satu daerah yang sudah melaksanakan kebijakan tersebut. Kabupaten Pati mulai melaksanakan tersebut pada tahun 2013. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pada saat pelimpahan tersebut pihak pemerintah pusat menyerahkan data piutang beserta aplikasi SISMIOP yang berisi data wajib pajak. Penyerahan data piutang tersebut diserahkan dengan Berita Acara Penyerahan data piutang PBB. Adapun dalam pelaksanaannya, pengalihan PBB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah masih menghadapi beberapa kendala terutama terkait validitas dan keakuratan data piutang PBB yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Data piutang PBB dalam Berita Acara Penyerahan Piutang PBB, hanya disebutkan sejumlah angka piutang secara global tanpa rincian yang jelas seperti nama wajib pajak dan letak objek pajaknya. Jumlah piutang dalam Berita Acara Penyerahan

Piutang PBB, juga tidak sama dengan jumlah piutang yang ada di aplikasi SISMIOP. Hal ini tentu menjadi masalah yang dihadapi BPKAD Kabupaten Pati dalam proses pelimpahan PBB.

Berdasarkan SE-14/PJ/2013, Penghapusan data piutang PBB adalah suatu tindakan penghapusan piutang PBB dari sistem administrasi karena kondisi tertentu, dimana atas tunggakan tersebut tidak dapat ditagih lagi karena faktor-faktor tertentu atau kadaluwarsa.

Dikarenakan proses penghapusan ini melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikannya, dan juga banyak ketidak sinkronan data yang diperoleh, maka diadakan lah penghapusan piutang PBB. Untuk menghapus Piutang PBB ini pun tidak langsung dihapuskan begitu saja. Namun banyak pihak yang ikut campur dengan penghapusan piutang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini akan menjelaskan topik tersebut dalam laporan yang akan disusun dengan judul “Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada BPKAD Kabupaten Pati”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak sekali hal yang dapat diuraikan, namun tentunya perlu adanya penentuan ruang lingkup penulisan agar setiap pembahasan akan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh para pembaca, serta tidak menyimpang dari objek.

Ruang lingkup penulisan meliputi :

1. Cara Penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan BPKAD Kabupaten Pati.
2. Kendala dan upaya yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Pati pada saat proses Penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Alasan dilakukannya Penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dalam Tugas Akhir ini,terdapat Tujuan dan juga Kegunaan penulisan.

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui tentang tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Pati,pada saat melakukan penghapusan piutang PBB,serta upaya apa yng dapat dilaukan untuk mengatasi kendala tersebut.
3. Untuk mengetahui alasan dilakukannya penghapusan piutang PBB.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai tata cara tentang bagaimana piutang pada PBB itu dapat dihapuskan

Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perpajakan dalam penulisan Tugas Akhir, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman untuk lebih siap dalam menghadapi persaingan dunia kerja, menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Perpajakan.

Sebagai sarana menciptakan hubungan yang baik dengan pihak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, Universitas dapat lebih berperan dalam menyesuaikan kegiatan pendidikannya sesuai peraturan-peraturan yang sekarang diterapkan, sebagai bahan pertimbangan dalam pemantapan mata kuliah Perpajakan.

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang penghapusan piutang PBB baik dalam lingkup perdesaan maupun perkotaan. Selain itu penelitian ini dapat memberi gambaran kepada masyarakat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan baik yang Perdesaan maupun Perkotaan,dapat dihapuskan

piutangnya. Dengan adanya hal tersebut maka masyarakat akan lebih memahami bahwa piutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidaklah terlalu susah.

Sebagai pertimbangan dan masukan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga dapat diperoleh penghapusan yang optimal sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasan yang sama, diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam Tugas Akhir ini, terdapat beberapa cara untuk mengumpulkan data, agar bisa menghasilkan sebuah laporan tugas akhir yang akurat.

1.4.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Data ini diperoleh ketika melakukan magang di BPKAD. Misalnya Data SPPT PBB P2, yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau orang lain (Sugiyono, 2012:225). Dalam penyusunan Tugas Akhir ini diperoleh data sekunder dari buku Pedoman Operasional yaitu buku catatan selama melakukan magang di BPKAD.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Metode Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan langsung kepada suatu obyek yang diteliti.

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan penyusunan dan pelaksanaan pembayaran pajak daerah di bagian PBB dan BPHTB.

b. Metode Wawancara

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan atau otoritas yaitu seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah.

Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap para pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati di bagian PBB dan BPHTB.

c. Metode Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori dan perbandingan di laporan.

Dalam hal ini di dapatkan dari hasil membaca dan mencatat dari buku-buku dan arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan dalam Tugas Akhir ini.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah pemahaman bagi setiap pembaca terhadap isi laporan sehingga tercipta suatu pemikiran dan gambaran obyek praktek yang lebih jelas maka diperlukan suatu sistematika penulisan laporan.

Sistematika dalam pembahasan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dari bab ini diuraikan mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuandan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam bab ini diuraikan mengenai kedudukan bagian keuangan, struktur organisasi, pembagian tugas pada Sub Bagian, visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta lokasi dan wilayah kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bab III : Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang praktek yang terjadi di lapangan yang didukung teori-teori dari sumber.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi ringkasan dari hasil pembahasan tentang Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Pada BPKAD Kabupaten Pati tahun 2008-2010.